



manual book SIPD HIBAH/BANSOS 2026

TATA CARA PENGAJUAN USULAN HIBAH/BANSOS

KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

VERSI 20 FEBRUARI 2025



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2025



DAFTAR ISI

1. DOMAIN WEBSITE.....	1
2. PENDAFTARAN AKUN.....	2
3. VERIFIKASI AKUN.....	3
4. PENGAJUAN USULAN.....	4
5. KELENGKAPAN ADMINISTRASI.....	5
6. ALUR VERIFIKASI.....	8
7. DAFTAR KAMUS USULAN.....	9



BAGIAN 1

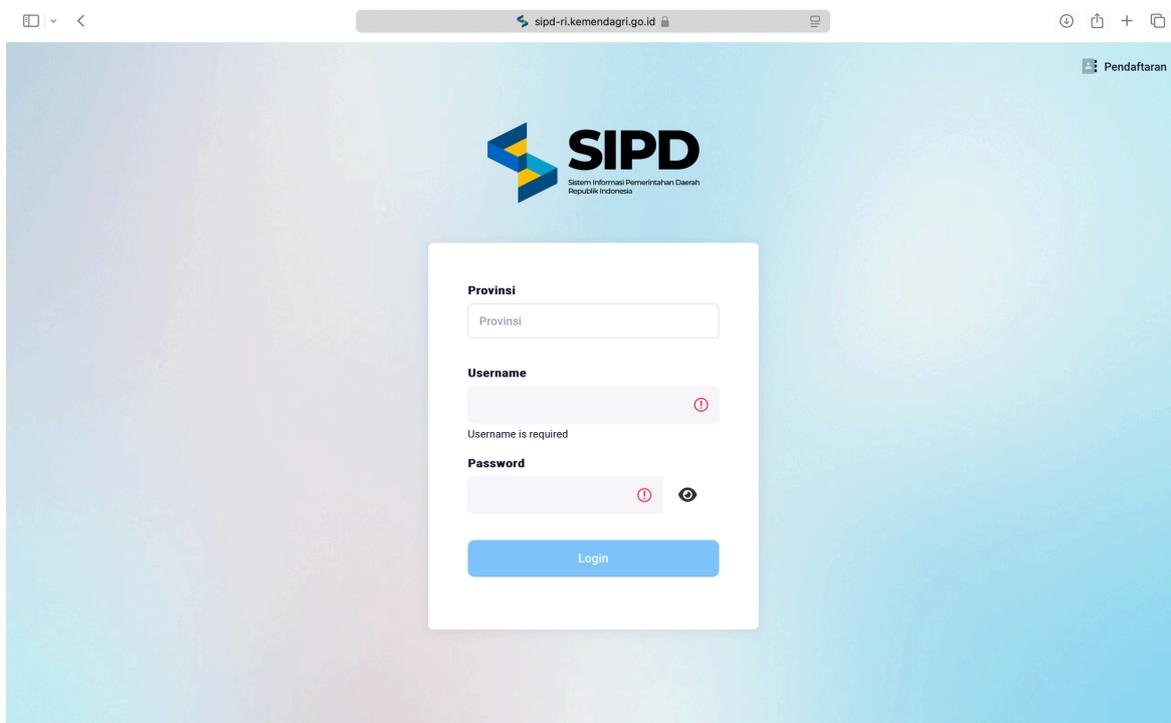
DOMAIN WEBSITE SIPD

Sesuai dengan SE Kemendagri Nomor : 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan SIPD RI untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025, beserta usulan aspirasi masyarakat (hibah/bansos, bantuan keuangan kabupaten/kota dan, bantuan keuangan desa) dan usulan reses pikir dewan.

Pengajuan usulan **hibah/bansos** untuk Tahun Anggaran 2026 dapat diajukan melalui :

<http://sipd-ri.kemendagri.go.id>

Berikut ini merupakan halaman awal website SIPD RI



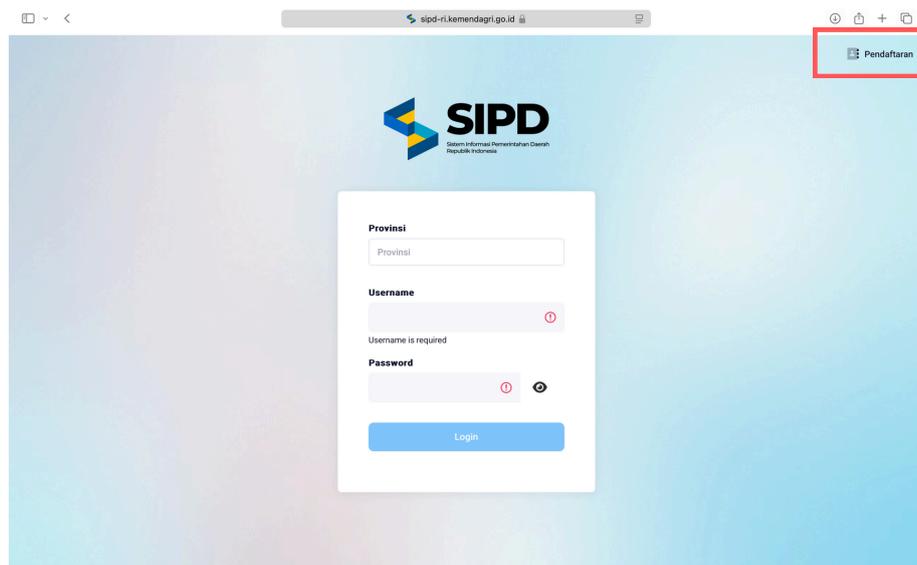
The screenshot shows the login page of the SIPD RI website. The page has a light blue background. At the top center is the SIPD logo, which consists of a stylized 'S' made of blue and yellow geometric shapes, followed by the text 'SIPD' and 'Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia'. Below the logo is a white login form with the following fields: 'Provinsi' (a dropdown menu), 'Username' (a text input field with a red error icon and the message 'Username is required'), and 'Password' (a text input field with a red error icon and a toggle eye icon). A blue 'Login' button is positioned below the password field. In the top right corner of the page, there is a 'Pendaftaran' link. The browser's address bar shows 'sipd-ri.kemendagri.go.id'.

BAGIAN 2

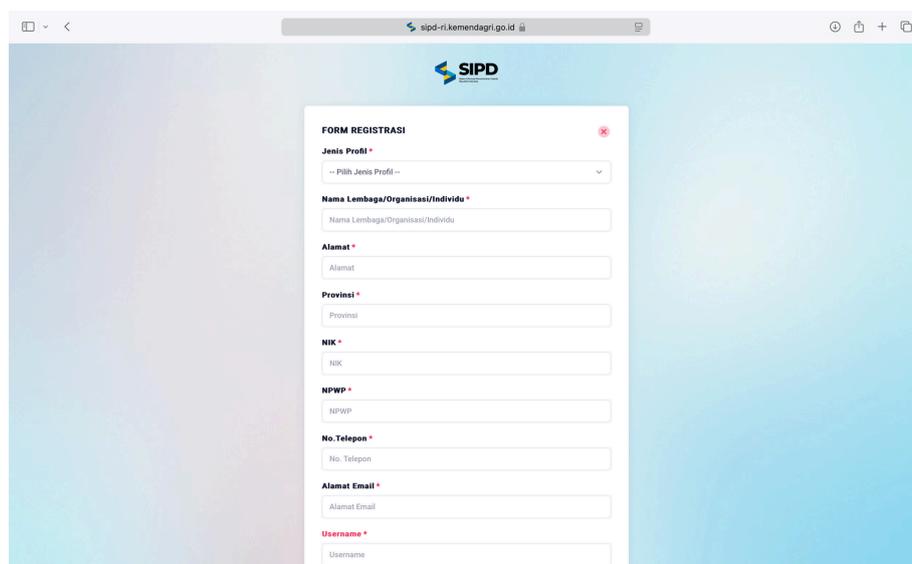
PENDAFTARAN AKUN PENGUSUL

Pendaftaran akun dilakukan bagi pengusul yang **belum pernah** mendaftarkan akun di SIPD RI, dan belum pernah mengajukan usulan di SIPD RI termasuk mengajukan usulan ke Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing domisili. Apabila pengusul sudah pernah mendaftarkan dan mengajukan usulan ke Pemerintah Kab/Kota di SIPD RI, dapat langsung melakukan log in menggunakan username dan password masing-masing.

Pendaftaran akun pengusul dapat dilakukan dengan klik tombol **Pendaftaran** di sebelah pojok kanan atas seperti gambar berikut:



Isi **FORM REGISTRASI** seperti pendaftaran akun pengusul di SIPD sebelumnya.



! Apabila terdapat notifikasi bahwa akun/NPWP **sudah terdaftar**, maka NPWP tersebut sudah terdaftar di SIPD RI atau hasil migrasi dari SIPD sebelumnya. Akun pengusul tersebut dapat dicek dan direset password oleh **Bappeda Kabupaten/Kota** masing-masing domisili.

BAGIAN 3

VERIFIKASI AKUN PENGUSUL

Setelah berhasil mendaftar, **akun harus diverifikasi** oleh **TAPD Bappeda Kabupaten/Kota** sesuai domisili masing-masing. Apabila tidak diverifikasi maka pengusul tidak bisa log in dan mengajukan usulan.

Harap **hubungi Bappeda Kab/Kota** domisili masing-masing untuk memverifikasi akun pengusul dan reset password, karena di akun provinsi tidak memiliki akses untuk verifikasi akun dan reset password akun pengusul.



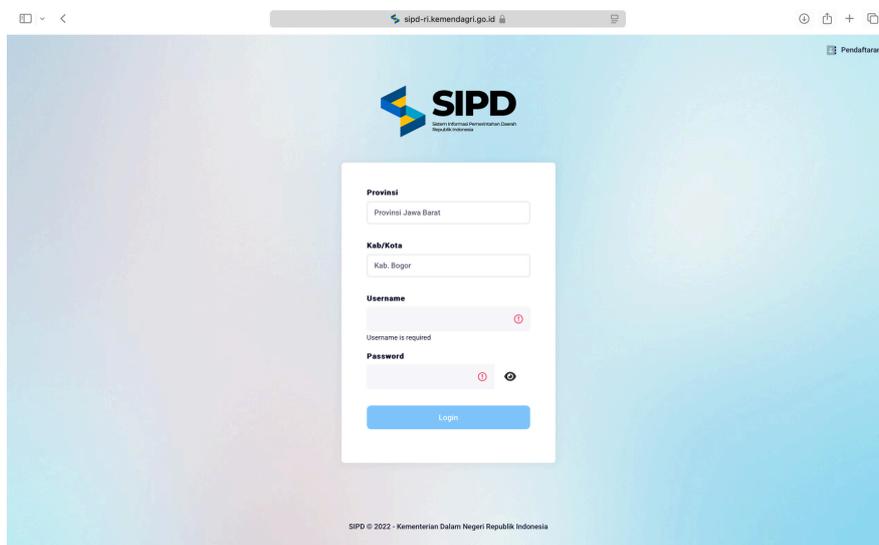
BAGIAN 4

PENGAJUAN USULAN (1)

LOG IN

Setelah akun diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota sesuai domisili masing-masing, pengusul dapat melakukan log in ke SIPD dgn domain seperti pada bagian 1.

1. Pilih Provinsi Jawa Barat
2. Kemudian pilih kabupaten/kota sesuai domisili akun yang didaftarkan sebelumnya
3. Masukkan username berupa NPWP untuk akun Lembaga dan NIK untuk akun Individu
4. Masukkan password sesuai yang telah didaftarkan.

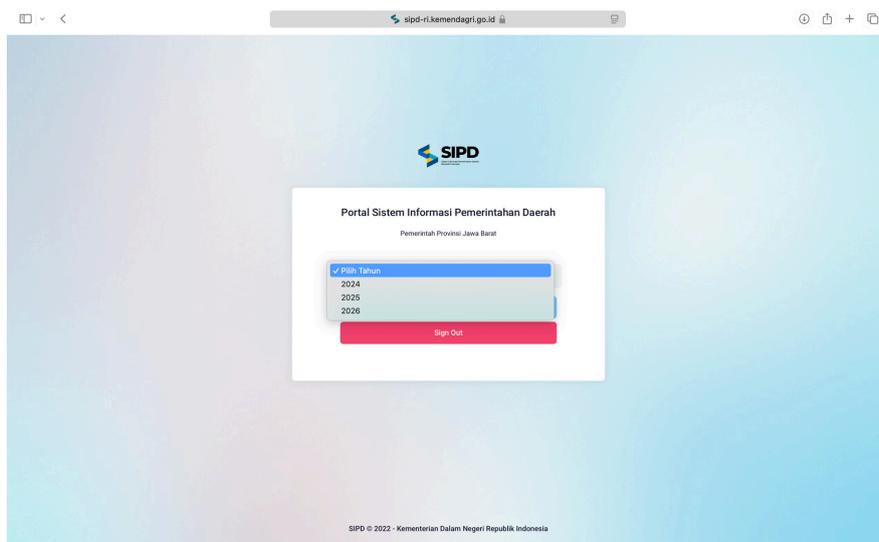


The screenshot shows the SIPD login interface. The form includes the following fields and elements:

- Provinsi:** Dropdown menu showing 'Provinsi Jawa Barat'.
- Kab/Kota:** Dropdown menu showing 'Kab. Bogor'.
- Username:** Text input field with a red error indicator and the message 'Username is required'.
- Password:** Text input field with a red error indicator and an eye icon for visibility toggle.
- Login:** A blue button to submit the login information.

The footer of the page reads: 'SIPD © 2022 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia'.

Pilih tahun 2026.



The screenshot shows the SIPD portal interface. The main content area displays:

- Portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Year Selection:** A dropdown menu with '2026 Tahun' selected. Other visible options are '2024' and '2025'.
- Sign Out:** A red button to log out of the system.

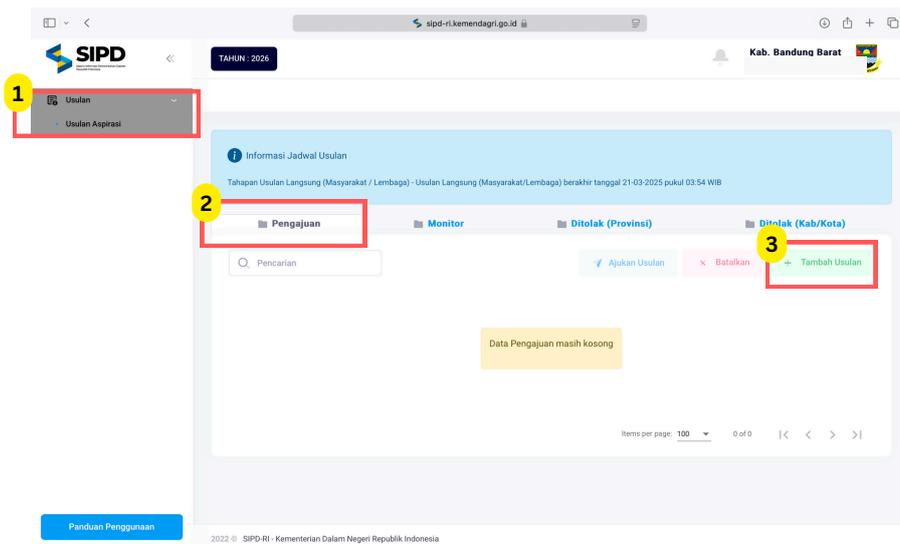
The footer of the page reads: 'SIPD © 2022 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia'.

BAGIAN 4

PENGAJUAN USULAN (2)

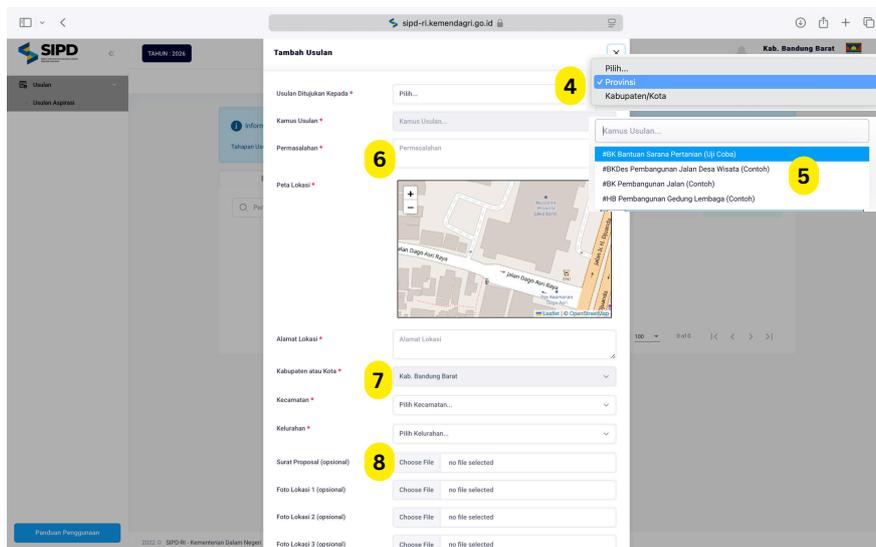
MEMBUAT USULAN

1. Pilih menu **Usulan** kemudian pilih **Usulan Aspirasi**
2. Masuk ke tab Pengajuan
3. Klik tombol Tambah Usulan untuk membuat usulan



Isi FORM USULAN

4. Pada kolom Usulan Ditujukan Kepada, Pilih **Provinsi**
5. Pilih Kamus Usulan dengan kode **#HB** untuk mengajukan usulan hibah/bansos
6. Isi Permasalahan
7. Masukkan alamat lokasi usulan
8. Pada kolom Surat Proposal, masukkan semua dokumen persyaratan seperti yang dijelaskan pada bagian 5 (**kelengkapan administrasi**) dan dibuat menjadi 1 file pdf



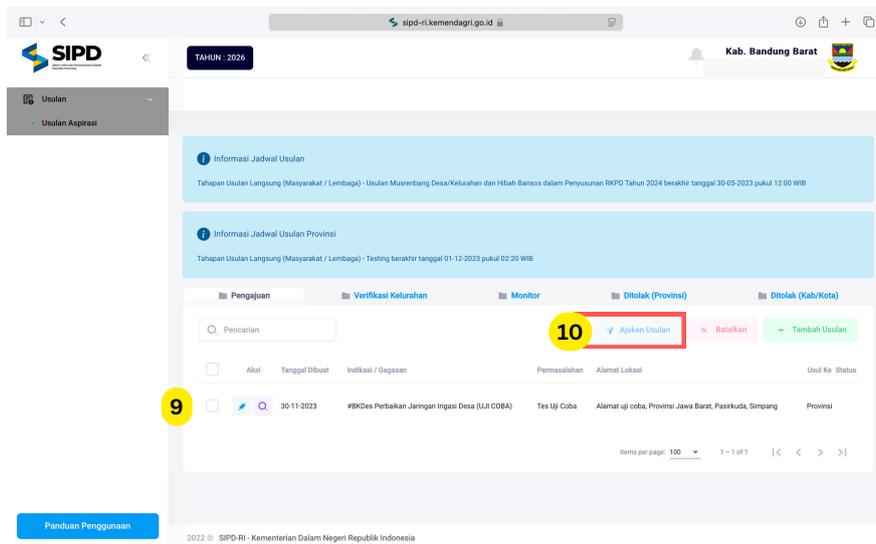
BAGIAN 4

PENGAJUAN USULAN (3)

MENGAJUKAN USULAN

9. **Ceklis** usulan yang akan diajukan

10. Klik tombol **Ajukan Usulan**. Usulan berhasil diajukan.



Setelah usulan berhasil diajukan, pengusul dapat memonitor usulan yang sudah diajukan dengan masuk ke tab **Monitor**. Apabila ada usulan yang dikembalikan, usulan akan masuk di tab Pengajuan, apabila usulan ditolak, akan masuk tab Ditolak (Provinsi).

BAGIAN 5

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kelengkapan administrasi usulan bantuan Hibah/Bantuan Sosial sesuai **Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2021**

Pasal 8a

Pengusulan Hibah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi lembaga/instansi/organisasi Pemohon Hibah, yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh :

1. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat
2. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain;
3. Direksi atau sebutan lain bagi BUMD atau BUMN;
4. Ketua atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
5. Partai Politik sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan bagi partai politik.

Pasal 8b

Lampiran surat pengantar berupa proposal yang memuat paling kurang : 1) Latar Belakang Kegiatan yang akan didanai Hibah; 2) Maksud dan Tujuan Kegiatan yang didanai melalui hibah; 3) Bentuk Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4) Bentuk jenis barang dan RAB; 5) Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, termasuk susunan organisasi dan nomer kontak; 6) Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan bantuan hibah; dan 7) Informasi lainnya yang diperlukan.

Pasal 8c dan 8d

Persyaratan administrasi :

1. Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
2. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
3. Berkedudukan di dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Memiliki kesekretariatan tetap di daerah yang bersangkutan;
5. Akta Notaris pendirian lembaga yang bersangkutan atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Izin Operasional atau Tanda Daftar dari Instansi yang Berwenang
8. Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan perundang-undangan



Kelengkapan administrasi di atas, perlu dijadikan 1 file pdf dgn maksimal ukuran file 2MB, yang kemudian diupload pada kolom Proposal pada Form Pengajuan Usulan.

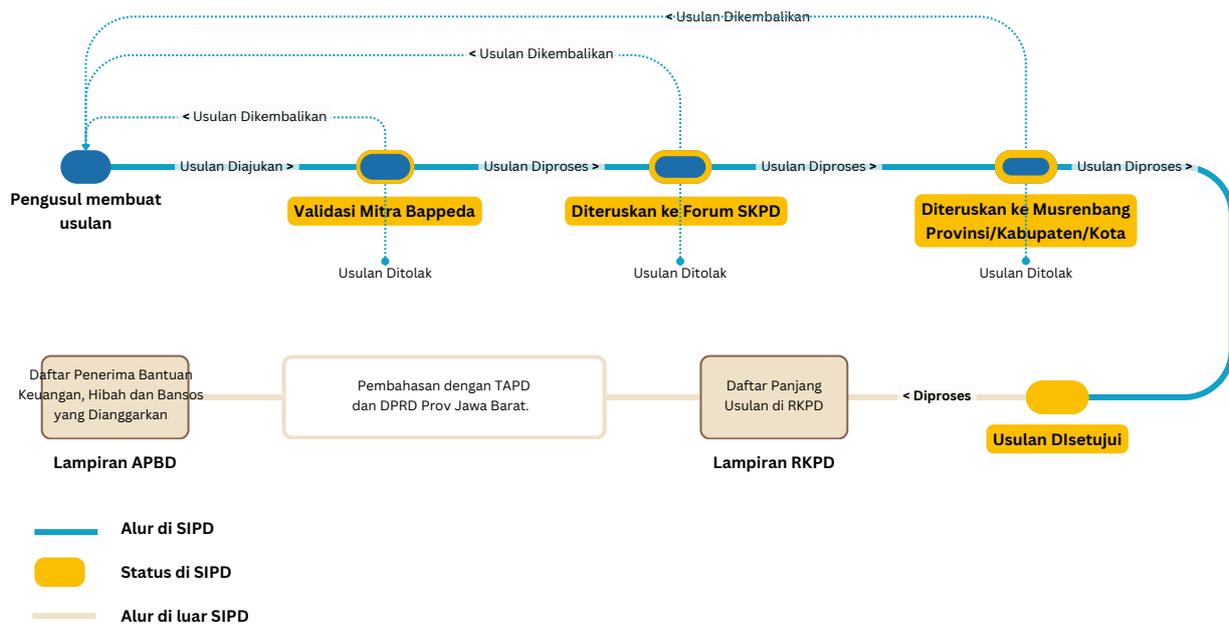
Tips: Apabila salah satu dokumen persyaratan memiliki ukuran file yang sangat besar, dokumen tersebut dapat diunggah di penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive, kemudian link dokumen tersebut dilampirkan pada halaman proposal yg diupload ke SIPD.



BAGIAN 6

ALUR VERIFIKASI USULAN

Alur verifikasi usulan masih sama dengan alur usulan pada SIPD sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 tahap verifikasi dan validasi usulan di SIPD, yaitu **validasi mitra bappeda**, **verifikasi oleh SKPD Tujuan**, dan **verifikasi oleh tapd bappeda** (diteruskan ke musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota), kemudian **usulan disetujui**.



Setelah proses verifikasi dan validasi di SIPD selesai, usulan yang disetujui akan menjadi daftar panjang usulan yang akan menjadi lampiran RKPD Provinsi Jawa Barat. Daftar panjang usulan ini akan dibahas kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menentukan daftar penerima bantuan keuangan, hibah dan bansos yang akan dianggarkan dan ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Barat.

Sehingga tidak semua usulan yang disetujui akan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



BAGIAN 7

DAFTAR KAMUS USULAN

Daftar kamus usulan dapat dilihat pada link berikut:

bit.ly/manual-book-kamus-usulan-2026

Daftar kamus usulan akan diupdate setelah ada pembahasan dengan TAPD



TERIMA KASIH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2025

